

OPTIMALISASI KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM DIGITALISASI PELAYANAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA KARANGANYAR, KABUPATEN TEGAL

Adinda Dyah Kumala^{1*}, Ahmad Naufal², Fauzan Firdaus³, Dinna Chaerunnisa⁴, Muhtadi⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

Penulis Korespondensi: adindadyahkumaladk@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 29 Oktober 2025</i> <i>Revised: 10 Desember 2025</i> <i>Published: 30 Desember 2025</i>	Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah Desa Karanganyar, Kabupaten Tegal, dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pelayanan publik dan penyaluran aspirasi masyarakat. Melalui pendekatan <i>Participatory Rural Appraisal</i> (PRA) dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD). Kegiatan dilaksanakan sejak tanggal 28 Juli hingga 28 Agustus 2025. Adapun mitra kegiatan adalah perangkat desa dan masyarakat khususnya Desa Karanganyar, Kabupaten Tegal. Program utama meliputi pembuatan <i>website</i> dan media sosial desa sebagai sarana informasi dan komunikasi dua arah. Hasilnya, meningkatnya kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan digital, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, serta terwujudnya pelayanan publik yang lebih transparan dan efisien.
Keywords <i>Pemerintah Desa;</i> <i>Digitalisasi;</i> <i>Aspirasi Masyarakat;</i> <i>Pelayanan Publik;</i>	

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena posisinya strategis, pemerintah desa diharapkan memiliki kapasitas optimal agar mampu memberikan pelayanan baik dan menampung aspirasi masyarakat secara efektif. Namun, banyak desa masih menghadapi kendala kompetensi dan pemanfaatan teknologi digital, sehingga pelayanan publik belum optimal dan penyampaian informasi kurang efektif, termasuk di Desa Karanganyar, Kabupaten Tegal.

Pada era digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan desa. Untuk itu, dilakukan program pembinaan dan pelatihan perangkat desa, organisasi desa, dan masyarakat di Desa Karanganyar berupa digitalisasi melalui website dan Instagram desa. Secara umum, website sebagai sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk digital baik itu teks, gambar, animasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses dari seluruh dunia yang memiliki koneksi internet (Athalia & Prasetyo, 2020). Website memudahkan masyarakat mengakses informasi, pelayanan, dan menyampaikan aspirasi, sedangkan media sosial menjadi sarana interaksi dan dokumentasi kegiatan atau potensi desa.

Aspirasi adalah suatu bentuk keinginan akan sesuatu serta cara menyampaikan pandangan yang bisa berupa masukan, pertanyaan, informasi, atau keluhan. Dalam suatu pemerintahan, komunikasi dengan masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, komunikasi dua arah sangat diperlukan, yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya dan pemerintah memberikan respon terhadap aspirasi yang disampaikan (Rochimayatillah, 2015).

Aspirasi masyarakat merupakan komponen penting dalam pembangunan partisipatif, yang mencakup usulan, kebutuhan, maupun kritik. Tanpa mekanisme yang baik, pemerintah desa kesulitan memahami permasalahan nyata masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem transparan dan partisipatif agar aspirasi tersalurkan dengan baik. Selain aspirasi, pelayanan

publik yang cepat, tepat, dan ramah juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan merupakan upaya penting untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Perangkat desa yang kompeten mampu mengelola aspirasi, menyusun perencanaan pembangunan partisipatif, serta melaksanakan pelayanan publik profesional, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan integritas pemerintahan.

Digitalisasi pemerintahan, menurut Kumorojati, merupakan transformasi yang melibatkan konversi data analog menjadi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah, karena aspirasi warga dan potensi lokal harus diarahkan secara efektif agar tercapai kemakmuran dan kemandirian masyarakat (Kumorojati & Mahardika, 2021). Dengan adanya sistem desa digital melalui sistem informasi desa, komunikasi antara aparat desa dengan warga menjadi lebih mudah, oleh karena itu dibutuhkan suatu media untuk berkomunikasi (Fardani, et al., 2021). Digitalisasi dan peningkatan kapasitas perangkat desa, pelayanan publik dapat lebih cepat, transparan, dan responsif, aspirasi masyarakat lebih mudah tersalurkan, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa meningkat. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan desa yang adaptif, inovatif, dan berbasis digital.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan metode berupa PRA dan FGD. Metode PRA digunakan sebagai strategi utama untuk mendorong proses pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Penggunaan PRA ini karena metode yang melibatkan langsung masyarakat secara aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, menganalisis situasi, hingga menentukan langkah-langkah pembangunan. Tahapan pemberdayaan ini melalui metode PRA dilakukan secara bertahap, mulai dari eksplorasi kebutuhan dan potensi lokal, penentuan prioritas permasalahan, pengembangan alternatif solusi bersama, hingga penyusunan serta pelaksanaan rencana kegiatan berbasis swadaya masyarakat. Melalui proses ini, diharapkan tumbuh kemandirian dan solidaritas dalam masyarakat untuk terus mengembangkan kapasitasnya secara berkelanjutan (Hudayana, et al., 2019).

PRA digunakan karena ingin melihat bagaimana masyarakat ikut terlibat menyeluruh dalam kesetaraan pengambilan keputusan, dan komitmen terhadap keberlanjutan program yang dilaksanakan terutama terkait digitalisasi pelayanan serta aspirasi masyarakat khususnya di Desa Karanganyar, Kab Tegal. Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) sangat relevan dalam program optimalisasi kapasitas pemerintah desa melalui digitalisasi pelayanan dan aspirasi masyarakat. Dengan PRA, kebutuhan dan masalah desa digali langsung dari warga sehingga website dan media sosial Instagram yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan nyata.

Metode FGD (forum group discussion) juga dilakukan sebagai metode karena FGD sendiri merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dengan melibatkan sejumlah kecil peserta untuk membahas topik tertentu secara mendalam. FGD pertama kami melakukan sosialisasi terkait tujuan dari pembuatan website dan media sosial yang dihadiri oleh masing-masing ketua Rt dan Ketua Rw Desa Karanganyar untuk memberitahu bahwa kami akan melaksanakan pelatihan pembuatan website dan media sosial untuk karanganyar eksis.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan FGD pertama bersama ketua Rt dan Rw Desa Karanganyar

FGD kedua dilaksanakan dalam bentuk workshop dimana kelompok kami melaksanakan kegiatan kepada ibu-ibu kwt, posyandu, karang taruna dan sebagian perangkat desa tentang bagaimana menulis berita yang baik dan benar untuk dimasukkan ke dalam website dan media sosial, tidak hanya itu kita juga melatih para peserta untuk mempresentasikan berita apa yang dibuatnya. Forum Group Discussion tentang optimalisasi kapasitas pemerintah desa dalam digitalisasi pelayanan dan aspirasi masyarakat di Desa Karanganyar, Kabupaten Tegal.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan Workshop bersama ibu-ibu kwt, posyandu, karang taruna dan perangkat desa

Metode Focus Group Discussion (FGD) memiliki peran penting dalam mendukung program optimalisasi kapasitas pemerintah desa melalui digitalisasi pelayanan dan aspirasi masyarakat. Melalui forum diskusi terarah ini, pemerintah desa dapat menggali pandangan, kebutuhan, serta kendala yang dihadapi warga terkait pelayanan publik. FGD juga membantu memetakan potensi sumber daya manusia lokal yang dapat diberdayakan dalam pelatihan pengelolaan website dan Instagram. Selain itu, forum ini menjadi sarana evaluasi bersama untuk menilai efektivitas layanan digital yang telah berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Kapasitas Pemerintah Desa dalam Digitalisasi Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat di Desa Karanganyar, Kabupaten Tegal dilaksanakan selama satu bulan, mulai 28

Juli hingga 28 Agustus 2025. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Focus Group Discussion (FGD), yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kemampuan aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan publik, memperkuat transparansi informasi, serta menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif.

Pelaksanaan program dimulai dengan tahap persiapan dan sosialisasi kepada pemerintah desa, ketua RT dan RW, serta berbagai lembaga masyarakat seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan Kelompok Wanita Tani (KWT). Sosialisasi ini bertujuan agar seluruh pihak memahami maksud, tujuan, dan manfaat digitalisasi pelayanan desa. Setelah kegiatan pengenalan, tim melakukan pemetaan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa melalui observasi dan wawancara dengan perangkat desa serta masyarakat. Dari hasil identifikasi diketahui bahwa pelayanan publik di Desa Karanganyar masih bersifat manual, kurang efisien, dan keterbukaan informasi masih terbatas. Selain itu, masyarakat belum memiliki sarana digital untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah desa. Kondisi tersebut menjadi dasar pengembangan program digitalisasi desa.

Salah satu hasil nyata dari kegiatan ini adalah pembuatan dan pengelolaan website Desa Karanganyar menggunakan platform Google Sites. Website ini berfungsi sebagai pusat informasi desa, wadah aspirasi masyarakat, serta sarana layanan administrasi online. Melalui website ini, warga dapat mengakses berbagai informasi terkait kegiatan pemerintahan, layanan administrasi, data kependudukan, berita kegiatan desa, serta laporan anggaran secara terbuka. Fitur ini menjadikan proses pelayanan publik lebih cepat, efisien, dan transparan. Sebelum adanya website, seluruh kegiatan administrasi dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu lama. Setelah website berfungsi, perangkat desa dapat memproses kebutuhan administrasi masyarakat dengan lebih mudah, sementara warga tidak perlu selalu datang ke balai desa untuk mendapatkan informasi.

Keberadaan website ini juga memperkuat prinsip good governance di tingkat desa, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Zein & Septiani (2024) bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan katalis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan partisipatif. Pemerintah Desa Karanganyar mulai mempraktikkan bentuk transparansi melalui publikasi kegiatan dan laporan keuangan secara digital, sehingga masyarakat dapat memantau kegiatan pemerintahan secara terbuka.

Selain website, kegiatan juga menghasilkan pembuatan akun media sosial resmi @villangekaranganyar yang digunakan sebagai media komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Instagram desa berperan penting dalam menyebarkan informasi kegiatan, promosi potensi lokal, serta menampung aspirasi warga. Konten yang diunggah meliputi dokumentasi kegiatan masyarakat, pemberdayaan UMKM, program kesehatan Posyandu, serta promosi hasil pertanian warga. Media sosial ini menjadi inovasi yang relevan di era digital karena mampu menjangkau generasi muda dan masyarakat yang aktif menggunakan internet. Pengelolaan akun dilakukan secara kolaboratif oleh perangkat desa dan pemuda Karang Taruna. Dampaknya, partisipasi masyarakat meningkat, khususnya generasi muda yang lebih termotivasi untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan desa.

Hasil lain yang diperoleh adalah pelatihan penulisan berita dan literasi digital bagi warga desa. Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari PKK, KWT, Karang Taruna, dan Posyandu. Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat mampu menulis berita yang informatif dan sesuai

dengan kaidah jurnalistik sederhana menggunakan metode 5W+1H. Peserta juga diajarkan cara mengunggah berita ke dalam website desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa literasi digital dapat memperluas peran masyarakat dalam tata kelola informasi publik. Setelah pelatihan, beberapa peserta berhasil menulis berita kegiatan desa dan mempublikasikannya melalui website. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan literasi digital dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan media desa.

Selain pelatihan, dilakukan juga pemetaan digital wilayah Desa Karanganyar yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal. Proses pemetaan menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Melalui kegiatan ini, warga berpartisipasi dalam menggambar peta wilayah, menentukan batas administratif, serta menandai lokasi fasilitas umum seperti sekolah, masjid, posyandu, dan area pertanian. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan Google Maps untuk membuat peta digital desa yang dilengkapi dengan QR Code menuju website desa. Peta ini kini menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan identifikasi potensi ekonomi desa.

Hasil lain yang tidak kalah penting adalah pelatihan khusus bagi perangkat desa dalam mengelola sistem digital. Pelatihan ini ditujukan untuk memastikan aparatur desa mampu mengoperasikan website dan media sosial secara mandiri. Salah satu peserta utama, yaitu Bapak Sahuri selaku admin desa, memperoleh bimbingan teknis dalam mengelola data, mengunggah berita, dan memperbarui konten website. Setelah pelatihan, perangkat desa menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan teknologi informasi. Mereka tidak hanya mampu memperbarui data, tetapi juga mulai menyusun laporan digital dan mengarsipkan dokumen pemerintahan secara online.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama program berjalan, diperoleh temuan bahwa digitalisasi pelayanan publik memberikan dampak positif terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara, sekitar 85% warga mengetahui adanya website desa, 70% aktif mengikuti informasi melalui media sosial, dan 100% perangkat desa menyatakan bahwa program ini membantu mempercepat pelayanan publik. Selain itu, masyarakat mengaku lebih mudah menyampaikan keluhan, saran, dan aspirasi melalui kanal digital yang tersedia. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kepercayaan warga terhadap pemerintah desa karena adanya keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Secara konseptual, hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi instrumen penting dalam proses transformasi tata kelola pemerintahan desa. Melalui digitalisasi, sistem pelayanan yang sebelumnya manual dapat diubah menjadi lebih efisien dan terukur. Website dan media sosial bukan hanya alat publikasi, tetapi juga sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan partisipatif. Penerapan digitalisasi juga sejalan dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto (2006), yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada peningkatan kemampuan individu agar mampu mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri. Dalam konteks ini, pemerintah desa tidak hanya diperkuat dalam aspek teknis, tetapi juga dalam hal manajemen, komunikasi, dan keterlibatan sosial.

Dampak lain dari pelaksanaan program ini juga terlihat pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya promosi potensi desa melalui website dan media sosial, produk-produk UMKM lokal, seperti emping melinjo dan hasil pertanian, mulai dikenal oleh masyarakat luar. Hal ini mendorong peningkatan daya saing dan peluang ekonomi bagi warga. Di sisi lain,

warga menjadi lebih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan karena mereka merasa terlibat langsung dalam pembangunan desa. Kolaborasi antara perangkat desa, mahasiswa, dan masyarakat menciptakan ekosistem digital yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, program ini juga menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, rendahnya literasi digital pada kelompok lanjut usia, serta kurangnya perangkat teknologi seperti komputer dan kamera dokumentasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan beberapa solusi strategis, antara lain menggunakan platform gratis seperti Google Sites, memberikan pendampingan intensif kepada admin desa, serta mengadakan pelatihan literasi digital dasar bagi masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini terbukti efektif karena mampu menjaga kesinambungan program walaupun dengan keterbatasan sumber daya.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa optimalisasi kapasitas pemerintah desa melalui digitalisasi pelayanan dan aspirasi masyarakat di Desa Karanganyar berjalan dengan efektif. Pemerintah desa menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi, dan sistem pelayanan publik menjadi lebih cepat dan transparan. Program ini bukan hanya sekadar penerapan teknologi, tetapi juga proses pemberdayaan sosial yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi dapat dipandang sebagai langkah nyata menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan di era digital.

KESIMPULAN

Melalui pengembangan website dan media sosial, masyarakat Desa Karanganyar kini lebih mudah mengakses informasi dan menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa dan masyarakat telah meningkatkan kompetensi dalam penggunaan teknologi digital, yang berkontribusi pada pengelolaan informasi yang lebih baik. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait keterbatasan akses teknologi dan pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi. Oleh karena itu, harus mengadakan sosialisasi lebih lanjut mengenai manfaat dan cara penggunaan platform digital harus dilakukan agar lebih banyak warga yang terlibat aktif dalam pengelolaan informasi desa. Selain itu, evaluasi dan monitoring rutin terhadap penggunaan website dan media sosial diperlukan untuk menilai efektivitasnya dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, Desa Karanganyar dapat terus maju dalam pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fardani, I., Rochman, G. P., Akhliyah, L. S., & Burhanuddin, H. (2021). Digitalisasi Desa Di Desa Cikole Lembang. *Resona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.5 No.2, 181–197.
- Rochmayatillah, A. (2015). *Sistem Informasi Aspirasi Masyarakat*. Universitas Gajah Mada.
- Zein, H. M., & Sisca, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah*. PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Edi, S. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Fardani, I., Rochman, G. P., Akhliyah, L. S., & Burhanuddin, H. (2021). Digitalisasi Desa Di Desa Cikole Lembang. *Resona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.5 No.2, 181–197.
- Hudayana, B., & Et.al. (2019). *Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa*



Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. Jurnal Bakti Budaya, Vol 2. No., 99–112.

Kumorojati, G. S., Mahardhika, G. P., & Setiaji, H. (2021). Digitalisasi Proses Bisnis Penjualan Studi Kasus PT Limas Indra Group. Automata, 2(2), 1–7.
<https://journal.uui.ac.id/AUTOMATA/article/view/19521>